

LAMPIRAN I
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE-05/PJ/2009
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
MENTERI KEUANGAN NOMOR
164/PMK.03/2008 TENTANG PEMBERIAN
PENGURANGAN PBB SEHUBUNGAN
DENGAN LUAPAN LUMPUR LAPINDO

Contoh Surat Permohonan:

Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Permohonan Pengurangan PBB Sehubungan Dengan Luapan Lumpur Sidoarjo
yang Diajukan Secara Perseorangan

Yth. Kepala KPP Pratama.....
.....
.....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
Desa/Kelurahan*) :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota*) :
Nomor Telepon :

mengajukan permohonan pengurangan PBB sebesar % (.....persen) dari PBB yang terutang,
atas objek pajak:

NOP :
Alamat :
Desa/Kelurahan*) :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota*) :

Alasan mengajukan permohonan karena objek pajak:**)

tidak dapat dimanfaatkan lagi; atau

manfaatnya mengalami penurunan,

sehubungan dengan luapan lumpur Sidoarjo.

Bersama ini dilampirkan:

1. fotokopi SPPT/SKP PBB Tahun Pajak
2. surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah*).....;
3. Surat Kuasa dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
4.

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

.....20.....
Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak*)

(.....)

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

**) berikan tanda "√" pada kotak yang sesuai.

LAMPIRAN II
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE-05/PJ/2009
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
MENTERI KEUANGAN NOMOR
164/PMK.03/2008 TENTANG PEMBERIAN
PENGURANGAN PBB SEHUBUNGAN
DENGAN LUAPAN LUMPUR LAPINDO

Contoh Surat Permohonan:

Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Permohonan Pengurangan PBB Sehubungan Dengan Luapan Lumpur Sidoarjo
yang Diajukan Secara Kolektif

Yth. Kepala KPP Pratama.....
.....
.....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Kepala Desa/Kelurahan*) :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota*) :
Nomor Telepon :

mengajukan permohonan pengurangan PBB yang terutang, atas sejumlah SPPT dan/atau SKP PBB yang terletak di desa/kelurahankarena objek pajak tidak dapat dimanfaatkan lagi atau manfaatnya mengalami penurunan sehubungan dengan luapan lumpur Sidoarjo.

Bersama ini dilampirkan:

1. daftar objek pajak yang diajukan pengurangan PBB;
2. fotokopi SPPT/SKP PBB Tahun Pajak sejumlah lembar;
3.

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

.....20.....
Kepala Desa/Lurah*)

(.....)

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

LAMPIRAN
SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN PBB SECARA
KOLEKTIF

**DAFTAR OBJEK PAJAK YANG DIAJUKAN PENGURANGAN PBB
SEHUBUNGAN DENGAN LUAPAN LUMPUR SIDOARJO SECARA KOLEKTIF**

Desa/Kelurahan*) :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Tahun Pajak :

No	Wajib Pajak		Objek Pajak		PBB Terutang (Rp)	Besarnya Permohonan Pengurangan (%)	Alasan Permohonan
	Nama	Alamat	NOP	Alamat			
1	2	3	4	5	6	7	8

Kepala Desa/Lurah*)

(.....)

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

LAMPIRAN III
 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR : SE-05/PJ/2009
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
 MENTERI KEUANGAN NOMOR
 164/PMK.03/2008 TENTANG PEMBERIAN
 PENGURANGAN PBB SEHUBUNGAN
 DENGAN LUAPAN LUMPUR LAPINDO

..... (1)

**LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN PERMOHONAN PENGURANGAN PBB
 SEHUBUNGAN DENGAN LUAPAN LUMPUR SIDOARJO**

Nomor: (2)

I. Surat Permohonan

Nomor dan Tanggal : (3)
 Tanggal Terima Surat : (4)
 Nomor LPAD/BPS : (5)

II. Identitas Pemohon

Nama : (6)
 Alamat : (7)

III. Ketentuan PBB

NOP : (8)
 Jumlah SPPT dan/atau SKP PBB : SPPT dan/atau..... SKP PBB (9)
 Tahun Pajak : (10)

IV. Penelitian Persyaratan*)**

No.	URAIAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Dalam hal permohonan perseorangan: Satu surat permohonan untuk 1 (satu) SPPT/SKP PBB			
	Dalam hal permohonan kolektif : PBB yang terutang paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)			
3.	Tertulis dalam bahasa Indonesia			
4.	Dalam hal permohonan perseorangan: Ditandatangani oleh Wajib Pajak/kuasanya			
	Dalam hal permohonan kolektif: Ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah			
5.	Fotokopi SPPT/SKP*)			
6.	Jangka waktu pengajuan permohonan terpenuhi			
7.	Keterangan Kepala Desa/Lurah**)			

V. Berdasarkan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka romawi IV, permohonan pengurangan dimaksud *memenuhi/tidak memenuhi* *) persyaratan.

.....20..... (11)
 Petugas Peneliti

..... (12)
 NIP (13)

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

***) dalam hal permohonan diajukan secara kolektif, surat permohonan berfungsi juga sebagai surat keterangan Kepala Desa/Lurah

****) diisi tanda checklist "√" pada kolom "ya" atau kolom "tidak" sesuai berkas yang tersedia.

Petunjuk Pengisian Lampiran III

- Angka 1 : Diisi dengan kop surat KPP Pratama yang bersangkutan.
- Angka 2 : Diisi dengan nomor Lembar Penelitian Persyaratan Permohonan Pengurangan PBB.
- Angka 3 : Diisi dengan nomor dan tanggal surat permohonan pengurangan PBB.
- Angka 4 : Diisi dengan tanggal diterimanya surat permohonan pengurangan PBB.
- Angka 5 : Diisi dengan nomor LPAD/BPS.
- Angka 6 : Diisi dengan nama pemohon, dalam hal permohonan diajukan secara kolektif diisi dengan Kepala Desa/Lurah yang bersangkutan.
- Angka 7 : Diisi dengan alamat pemohon.
- Angka 8 : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP), dalam hal permohonan diajukan secara kolektif tidak perlu diisi.
- Angka 9 : Diisi dengan jumlah SPPT/SKP PBB yang diajukan permohonan pengurangan PBB.
- Angka 10 : Diisi dengan Tahun Pajak SPPT/SKP PBB.
- Angka 11 : Diisi dengan kota dan tanggal penelitian persyaratan permohonan pengurangan PBB dilaksanakan.
- Angka 12 : Diisi dengan nama petugas peneliti yang menandatangani lembar penelitian.
- Angka 13 : Diisi dengan NIP petugas peneliti yang menandatangani lembar penelitian.

LAMPIRAN IV
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE-05/PJ/2009
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
MENTERI KEUANGAN NOMOR
164/PMK.03/2008 TENTANG PEMBERIAN
PENGURANGAN PBB SEHUBUNGAN
DENGAN LUAPAN LUMPUR LAPINDO

..... (1)

Nomor : S- 2)
.....3)
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Pemberitahuan Permohonan Pengurangan PBB
Sehubungan Dengan Luapan Lumpur Sidoarjo
Tidak Dipertimbangkan

Yth. 4)
.....
.....

Sehubungan dengan permohonan pengurangan Saudara melalui surat nomor 5) tanggal
6) yang diterima tanggal 7), bersama ini disampaikan bahwa:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-164/PMK.03/2008 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Sehubungan Dengan Luapan Lumpur Sidoarjo, diatur bahwa:

pasal 5:

- (1) Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diajukan secara perseorangan, atau kolektif melalui Kepala Desa/Lurah.
- (2) Permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. satu permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKP PBB, kecuali untuk permohonan yang diajukan secara kolektif;
 - b. dalam hal permohonan diajukan secara kolektif, SPPT dan/atau SKP PBB harus untuk tahun pajak yang sama dan Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - c. diajukan kepada Kepala KPP Pratama;
 - d. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan alasan bahwa objek pajak tidak dapat dimanfaatkan atau manfaatnya mengalami penurunan akibat terkena luapan lumpur Sidoarjo;
 - e. dilampiri fotokopi SPPT atau SKP PBB yang diajukan pengurangan;
 - f. dilampiri surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah atau instansi terkait yang menyatakan bahwa objek pajak tidak dapat dimanfaatkan atau manfaatnya mengalami penurunan akibat terkena luapan lumpur Sidoarjo; dan
 - g. diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT atau SKP PBB.
- (3) Permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap bukan sebagai surat permohonan pengurangan sehingga tidak dipertimbangkan.

2. Berdasarkan penelitian kami, permohonan Saudara tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-164/PMK.03/2008, yaitu:

- a. ;
- b. 8);
- c. dst.

sehingga sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK- 164/PMK.03/2008 permohonan Saudara tidak dipertimbangkan, dan terlampir dikembalikan berkas permohonan pengurangan Saudara.

3. saudara masih dapat mengajukan kembali permohonan pengurangan dengan terlebih dahulu melengkapi persyaratan sebagaimana tersebut di atas sepanjang masih memenuhi jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT atau SKP PBB.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

.....9)

..... 10)
NIP 11)

Petunjuk Pengisian Lampiran IV

- Angka 1 : Diisi dengan kop surat KPP Pratama yang bersangkutan.
- Angka 2 : Diisi dengan nomor surat pemberitahuan.
- Angka 3 : Diisi dengan kota dan tanggal dibuatnya surat pemberitahuan.
- Angka 4 : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak atau Kepala Desa/Lurah bersangkutan dalam hal diajukan secara kolektif.
- Angka 5 : Diisi dengan nomor surat permohonan pengurangan PBB.
- Angka 6 : Diisi dengan tanggal surat permohonan pengurangan PBB.
- Angka 7 : Diisi dengan tanggal diterimanya surat permohonan pengurangan PBB (LPAD/BPS).
- Angka 8 : Diisi dengan persyaratan permohonan pengurangan PBB yang tidak dipenuhi.
- Angka 9 : Diisi dengan nama jabatan pejabat yang berwenang menandatangani surat pemberitahuan.
- Angka 10 : Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani surat pemberitahuan.
- Angka 11 : Diisi dengan NIP pejabat yang berwenang menandatangani surat pemberitahuan.

LAMPIRAN V
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE-05/PJ/2009
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
MENTERI KEUANGAN NOMOR
164/PMK.03/2008 TENTANG PEMBERIAN
PENGURANGAN PBB SEHUBUNGAN
DENGAN LUAPAN LUMPUR LAPINDO

..... (1)

Nomor : S- 2)
.....3)
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penerusan Permohonan Pengurangan PBB
Sehubungan Dengan Luapan Lumpur Sidoarjo

Yth. Direktur Jenderal Pajak/Kepala Kantor Wilayah DJP *)
..... 4)
.....

Sehubungan dengan diterimanya permohonan pengurangan PBB sebagai berikut:

I. Surat Permohonan Pengurangan

Nomor dan Tanggal : (5)
Tanggal Terima Surat : (6)
Nomor Tanda Reima Surat : (7)

II. Identitas Pemohon

Nama : (8)
Alamat : (9)

III. Permohonan Pengurangan

Jenis Ketetapan : SPPT/SKP PBB*)
NOP : 10)
PBB yang terutang : Rp 11)
(.....) 12)

Bersama ini diteruskan permohonan tersebut mengingat kewenangan untuk memproses berada pada Direktur Jenderal Pajak/Kepala Kanwil DJP. Terlampir disampaikan berkas permohonan pengurangan tersebut beserta Lembar Penelitian Persyaratan Permohonan Pengurangan PBB Nomor..... 13) tanggal..... 14) untuk ditindaklanjuti.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

..... 15)

..... 16)
NIP 17)

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian Lampiran V

- Angka 1 : Diisi dengan kop surat KPP Pratama yang bersangkutan.
- Angka 2 : Diisi dengan nomor surat penerusan.
- Angka 3 : Diisi dengan kota dan tanggal dibuatnya surat penerusan.
- Angka 4 : Diisi dengan alamat Direktorat Jenderal Pajak/Kanwil DJP yang bersangkutan.
- Angka 5 : Diisi dengan nomor dan tanggal surat permohonan pengurangan PBB.
- Angka 6 : Diisi dengan tanggal diterimanya surat permohonan pengurangan PBB.
- Angka 7 : Diisi dengan nomor tanda terima surat permohonan pengurangan PBB (LPAD/BPS).
- Angka 8 : Diisi dengan nama Wajib Pajak atau Kepala Desa/Kelurahan bersangkutan dalam hal diajukan secara kolektif.
- Angka 9 : Diisi dengan alamat pemohon atau nama Desa/Kelurahan dan Kecamatan dalam hal diajukan secara kolektif.
- Angka 10 : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP).
- Angka 11 : Diisi dengan besarnya PBB yang terutang dengan angka.
- Angka 12 : Diisi dengan besarnya PBB yang terutang dengan huruf.
- Angka 13 : Diisi dengan nomor Lembar Penelitian Persyaratan Permohonan Pengurangan PBB.
- Angka 14 : Diisi dengan tanggal Lembar Penelitian Persyaratan Permohonan Pengurangan PBB dibuat.
- Angka 15 : Diisi dengan nama jabatan pejabat yang berwenang menandatangani surat penerusan.
- Angka 16 : Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani surat penerusan.
- Angka 17 : Diisi dengan NIP pejabat yang berwenang menandatangani surat pemberitahuan.

LAMPIRAN VI
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE-05/PJ/2009
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
MENTERI KEUANGAN NOMOR
164/PMK.03/2008 TENTANG PEMBERIAN
PENGURANGAN PBB SEHUBUNGAN
DENGAN LUAPAN LUMPUR LAPINDO

..... (1)

SURAT TUGAS
ST-..... 2)

Sehubungan dengan pengajuan permohonan pengurangan PBB yang terutang sehubungan dengan luapan Lumpur Sidoarjo, dengan ini kami menugaskan:

1. Nama : 3)
NIP : 4)
Pangkat/Gol : 5)
Jabatan : 6)

2. Nama : 3)
NIP : 4)
Pangkat/Gol : 5)
Jabatan : 6)

Untuk melaksanakan penelitian atas permohonan pengurangan PBB yang diajukan melalui surat:

Nomor : 7)
Tanggal : 8)

dari :

Nama : 9)
Alamat : 10)

Atas SPPT/SKP PBB*) NOP 11) Mulai tanggal 12) sampai dengan tanggal 13)

Demikian untuk dilaksanakan dan setelah selesai melaksanakan tugas agar menyampaikan laporan.

Kepada instansi terkait kami minta bantuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas tersebut.

Ditetapkan di 14)

Pada tanggal 15)

..... 16)

..... 17)

NIP 18)

Tembusan:

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian Lampiran VI

- Angka 1 : Diisi dengan kop surat kantor Direktorat Jenderal Pajak yang bersangkutan.
- Angka 2 : Diisi dengan nomor Surat Tugas.
- Angka 3 : Diisi dengan nama petugas peneliti yang ditunjuk.
- Angka 4 : Diisi dengan NIP petugas peneliti yang ditunjuk.
- Angka 5 : Diisi dengan pangkat dan golongan petugas peneliti yang ditunjuk.
- Angka 6 : Diisi dengan jabatan petugas peneliti yang ditunjuk.
- Angka 7 : Diisi dengan nomor surat permohonan pengurangan PBB.
- Angka 8 : Diisi dengan tanggal surat permohonan pengurangan PBB.
- Angka 9 : Diisi dengan nama Wajib Pajak atau Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan dalam hal diajukan secara kolektif.
- Angka 10 : Diisi dengan alamat pemohon atau nama Desa/Kelurahan dan Kecamatan dalam hal diajukan secara kolektif.
- Angka 11 : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) (tidak perlu diisi dalam hal diajukan secara kolektif).
- Angka 12 : Diisi dengan tanggal mulai tugas penelitian.
- Angka 13 : Diisi dengan tanggal akhir tugas penelitian.
- Angka 14 : Diisi dengan nama kota Surat Tugas diterbitkan.
- Angka 15 : Diisi dengan tanggal Surat Tugas diterbitkan.
- Angka 16 : Diisi dengan nama jabatan pejabat yang berwenang menandatangani Surat Tugas.
- Angka 17 : Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani Surat Tugas.
- Angka 18 : Diisi dengan NIP pejabat yang berwenang menandatangani Surat Tugas.

LAMPIRAN VII
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE-05/PJ/2009
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
MENTERI KEUANGAN NOMOR
164/PMK.03/2008 TENTANG PEMBERIAN
PENGURANGAN PBB SEHUBUNGAN
DENGAN LUAPAN LUMPUR LAPINDO

..... 1)

Nomor : S- 2)3)
Sifat : Segera
Hal : Pemberitahuan Penelitian di Lapangan
Permohonan Pengurangan PBB Sehubungan Dengan Luapan Lumpur Sidoarjo

Yth. 4)
.....
.....

Sehubungan dengan surat permohonan pengurangan PBB Saudara nomor 5) tanggal
6) atas SPPT/SKP PBB*) NOP 7), dengan ini diberitahukan bahwa akan diadakan penelitian di
lapangan pada hari/tanggal 8).

Demi kelancaran jalannya penelitian, diminta bantuan Saudara atau kuasanya untuk mendampingi petugas peneliti.

Demikian untuk mendapat perhatian Saudara.

..... 9)

..... 10)
NIP 11)

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian Lampiran VII

- Angka 1 : Diisi dengan kop surat kantor yang bersangkutan.
- Angka 2 : Diisi dengan nomor surat pemberitahuan.
- Angka 3 : Diisi dengan nama kota dan tanggal dibuatnya surat pemberitahuan.
- Angka 4 : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak atau Kepala Desa/Lurah bersangkutan dalam hal diajukan secara kolektif.
- Angka 5 : Diisi dengan nomor surat permohonan pengurangan PBB.
- Angka 6 : Diisi dengan tanggal surat permohonan pengurangan PBB.
- Angka 7 : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) (tidak perlu diisi dalam hal diajukan secara kolektif).
- Angka 8 : Diisi dengan hari/tanggal penelitian di lapangan.
- Angka 9 : Diisi dengan nama jabatan pejabat yang berwenang menandatangani surat pemberitahuan.
- Angka 10 : Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani surat pemberitahuan.
- Angka 11 : Diisi dengan NIP pejabat yang berwenang menandatangani surat pemberitahuan.

LAMPIRAN VIII
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE-05/PJ/2009
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
MENTERI KEUANGAN NOMOR
164/PMK.03/2008 TENTANG PEMBERIAN
PENGURANGAN PBB SEHUBUNGAN
DENGAN LUAPAN LUMPUR LAPINDO

..... (1)

**LAPORAN HASIL PENELITIAN
PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
SEHUBUNGAN DENGAN LUAPAN LUMPUR SIDOARJO
YANG DIAJUKAN SECARA PERSEORANGAN**

Nomor : LAP- (2)

Berdasarkan Surat Tugas nomor.....(3) tanggal(4) telah dilakukan penelitian dari tanggal(5) sampai dengan tanggal (6) terhadap permohonan pengurangan PBB yang diajukan secara perseorangan oleh Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak*).

Nama : (7)

Alamat : (8)

melalui surat nomor (9) tanggal (10) yang diterima KPP Pratama(11) berdasarkan LPAD/BPS nomor (12) tanggal (13), dengan uraian sebagai berikut:

I. UMUM

1. NOP : (14)
2. Alamat objek pajak : (15)
3. Tahun Pajak : (16)
4. Jenis ketetapan : SPPT/SKP PBB*)
5. PBB Terutang : Rp (17)
(.....) (18)

II. DASAR HUKUM

1. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.03/2008 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Sehubungan Dengan Luapan Lumpur Sidoarjo.

III. HASIL PENELITIAN

.....
.....
.....

IV. KESIMPULAN DAN USUL

1. Kesimpulan
Kondisi objek pajak **)
 tidak dapat dimanfaatkan
 penurunan manfaat (19) % (..... (20) persen)
 tidak terkena dampak luapan lumpur Sidoarjo.

2. Usul
.....
.....
.....

..... (21)

Petugas Peneliti I

Petugas Peneliti II

..... (22)
NIP (22)

..... (23)
NIP (23)

Mengetahui,
.....(24)

..... (25)
NIP (26)

Keterangan:

- *) coret yang tidak perlu
- ***) berikan tanda "√" pada kotak yang sesuai

Petunjuk Pengisian Lampiran VIII

- Angka 1 : Diisi dengan kop surat kantor Direktorat Jenderal Pajak yang bersangkutan.
- Angka 2 : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB.
- Angka 3 : Diisi dengan nomor Surat Tugas.
- Angka 4 : Diisi dengan tanggal Surat Tugas.
- Angka 5 : Diisi dengan tanggal mulainya pelaksanaan penelitian pengurangan PBB.
- Angka 6 : Diisi dengan tanggal berakhirnya pelaksanaan penelitian pengurangan PBB.
- Angka 7 : Diisi dengan nama pemohon.
- Angka 8 : Diisi dengan alamat pemohon.
- Angka 9 : Diisi dengan nomor surat permohonan pengurangan PBB.
- Angka 10 : Diisi dengan tanggal surat permohonan pengurangan PBB.
- Angka 11 : Diisi dengan nama KPP Pratama yang bersangkutan.
- Angka 12 : Diisi dengan nomor LPAD/BPS.
- Angka 13 : Diisi dengan tanggal LPAD/BPS.
- Angka 14 : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP).
- Angka 15 : Diisi dengan alamat objek pajak.
- Angka 16 : Diisi dengan Tahun Pajak SPPT/SKP PBB.
- Angka 17 : Diisi dengan besarnya PBB yang terutang dengan angka.
- Angka 18 : Diisi dengan besarnya PBB yang terutang dengan huruf.
- Angka 19 : Diisi dengan persentase penurunan manfaat dengan angka.
- Angka 20 : Diisi dengan persentase penurunan manfaat dengan huruf.
- Angka 21 : Diisi dengan kota dan tanggal Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB dibuat.
- Angka 22 : Diisi dengan nama petugas peneliti yang menandatangani Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB.
- Angka 23 : Diisi dengan NIP petugas peneliti yang menandatangani Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB.
- Angka 24 : Diisi dengan jabatan pejabat yang berwenang untuk mengetahui.
- Angka 25 : Diisi dengan nama pejabat yang berwenang mengetahui.
- Angka 26 : Diisi dengan NIP pejabat yang berwenang mengetahui.

LAMPIRAN IX
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE-05/PJ/2009
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
MENTERI KEUANGAN NOMOR
164/PMK.03/2008 TENTANG PEMBERIAN
PENGURANGAN PBB SEHUBUNGAN
DENGAN LUAPAN LUMPUR LAPINDO

..... (1)

**LAPORAN HASIL PENELITIAN PENGURANGAN PBB
SEHUBUNGAN DENGAN LUAPAN LUMPUR SIDOARJO
YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF**

Nomor : LAP- (2)

Berdasarkan Surat Tugas nomor (3) tanggal..... (4) telah dilakukan penelitian dari tanggal (5) sampai dengan tanggal(6) terhadap permohonan pengurangan PBB yang diajukan secara kolektif oleh:

Kepala Desa/Lurah*) : (7)
Alamat : (8)
Sejumlah :SPPT dan/atau..... SKP PBB (9)

melalui surat nomor..... (10) tanggal..... (11) yang diterima KPP Pratama..... (12) sesuai LPAD/BPS nomor..... (13) tanggal..... (14), dengan uraian sebagai berikut:

I. UMUM

Data Wajib Pajak, objek pajak, besarnya PBB terutang, dan besarnya persentase permohonan pengurangan masing-masing Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5, kolom 6, dan kolom 7 lampiran Laporan Hasil Penelitian Pengurangan ini.

II. DASAR HUKUM

1. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.03/2008 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Sehubungan Dengan Luapan Lumpur Sidoarjo.

III. HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian untuk masing-masing objek pajak adalah sebagaimana tercantum dalam kolom 8, kolom 9, atau kolom 10 lampiran Laporan Hasil Penelitian Pengurangan ini.

IV. USUL BESARNYA PENGURANGAN

Usul besarnya pengurangan untuk masing-masing objek pajak adalah sebagaimana tercantum dalam kolom 11 lampiran Laporan Hasil Penelitian Pengurangan ini.

..... (15)

Petugas Peneliti I

Petugas Peneliti II

..... (16)
NIP (17)

..... (16)
NIP (17)

Mengetahui,
.....(18)

..... (19)
NIP (20)

Keterangan:
*) coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian Lampiran IX

- Angka 1 : Diisi dengan kop surat KPP Pratama yang bersangkutan.
- Angka 2 : Diisi dengan nomor laporan hasil penelitian pengurangan PBB.
- Angka 3 : Diisi dengan nomor Surat Tugas.
- Angka 4 : Diisi dengan tanggal Surat Tugas.
- Angka 5 : Diisi dengan tanggal mulainya pelaksanaan penelitian pengurangan PBB.
- Angka 6 : Diisi dengan tanggal berakhirnya pelaksanaan penelitian pengurangan PBB.
- Angka 7 : Diisi dengan nama Desa/Kelurahan yang bersangkutan.
- Angka 8 : Diisi dengan alamat Kepala Desa/lurah yang bersangkutan.
- Angka 9 : Diisi dengan jumlah SPPT dan/atau SKP PBB yang diajukan pengurangan PBB.
- Angka 10 : Diisi dengan nomor surat permohonan pengurangan PBB.
- Angka 11 : Diisi dengan tanggal surat permohonan pengurangan PBB.
- Angka 12 : Diisi dengan KPP Pratama yang bersangkutan.
- Angka 13 : Diisi dengan nomor LPAD/BPS.
- Angka 14 : Diisi dengan tanggal LPAD/BPS.
- Angka 15 : Diisi dengan kota dan tanggal laporan hasil penelitian pengurangan PBB dibuat.
- Angka 16 : Diisi dengan nama petugas peneliti yang menandatangani laporan hasil penelitian pengurangan PBB.
- Angka 17 : Diisi dengan NIP petugas peneliti yang menandatangani laporan hasil penelitian pengurangan PBB.
- Angka 18 : Diisi dengan jabatan pejabat yang berwenang untuk mengetahui.
- Angka 19 : Diisi dengan nama pejabat yang berwenang mengetahui.
- Angka 20 : Diisi dengan NIP pejabat yang berwenang mengetahui.

Petunjuk Pengisian Lampiran Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB Sehubungan Dengan Luapan Lumpur Sidoarjo yang Diajukan Secara Kolektif

- Angka 1 : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB.
- Angka 2 : Diisi dengan Desa/Kelurahan yang bersangkutan.
- Angka 3 : Diisi dengan Kecamatan yang bersangkutan.
- Angka 4 : Diisi dengan Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- Angka 5 : Diisi dengan Tahun Pajak SPPT/SKP PBB yang diajukan pengurangan.
- Angka 6 : Diisi dengan jabatan Pejabat yang berwenang untuk mengetahui.
- Angka 7 : Diisi dengan nama Pejabat yang berwenang mengetahui.
- Angka 8 : Diisi dengan NIP Pejabat yang berwenang mengetahui.

Pengisian kolom :

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut.
- Kolom 2 : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Kolom 3 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Kolom 4 : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP).
- Kolom 5 : Diisi dengan alamat objek pajak.
- Kolom 6 : Diisi dengan besarnya PBB yang terutang.
- Kolom 7 : Diisi dengan besarnya persentase permohonan pengurangan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- Kolom 8 : Diisi dengan tanda "√", apabila kondisi objek pajak memenuhi kriteria yang dimaksud.
- Kolom 9 : Diisi dengan besarnya persentase penurunan manfaat akibat luapan lumpur Sidoarjo.
- Kolom 10 : Diisi dengan tanda "√", apabila kondisi objek pajak memenuhi kriteria yang dimaksud.
- Kolom 11 : Diisi dengan usulan besarnya pengurangan yang dapat diberikan atas objek yang bersangkutan

LAMPIRAN

LAPORAN HASIL PENELITIAN PENGURANGAN PBB
SEHUBUNGAN DENGAN LUAPAN LUMPUR SIDOARJO
YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF
Nomor LAP:

**DAFTAR HASIL PENELITIAN PENGURANGAN PBB
SEHUBUNGAN DENGAN LUAPAN LUMPUR SIDOARJO SECARA KOLEKTIF**

Desa/Kelurahan*) : (2)
Kecamatan : (3)
Kabupaten/Kota : (4)
Tahun Pajak : (5)

No	Wajib Pajak		Objek Pajak		PBB Terutang (Rp)	Permohonan Pengurangan (%)	Hasil Penelitian			Usul Besarnya Pengurangan
	Nama	Alamat	NOP	Alamat			Tidak Dapat Dimanfaatkan	Penurunan Manfaat (%)	Tidak Terkena Dampak	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Mengetahui,
..... (6)

..... (7)
NIP (8)

*) coret yang tidak perlu